

Bijak dan Kreatif Menggunakan Bantuan Kuota Internet Kemendikbud RI

Oleh:
Titis Setyono Adi Nugroho
Dosen Prodi Musik FSP ISI Yogyakarta



Tahun 2020 memang berbeda dengan tahun sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sangat begitu terasa. Salah satunya di sektor Pendidikan. Seluruh kegiatan pembelajaran dipaksa diselenggarakan melalui sistem daring (Kemdikbud.go.id, 2020) sejak diterbitkannya SE Mendikbud RI Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 pada Maret 2020 hingga kini [1]. Adapun pengecualian (Kompas.com, 2020) bagi wilayah hijau diperbolehkan melaksanakan pembelajaran luring secara bergantian sesuai protokol kesehatan.

Beberapa pekan lalu, bertepatan di Hari Guru, Mendikbud RI, Nadiem Makarim menyampaikan pidatonya melalui kanal Youtube Kemendikbud RI. Melalui kesempatan itu, Mas Menteri memaparkan beberapa kebijakan dan program yang telah dibuat khusus di masa pandemi ini. Salah satu kebijakan dan program tersebut meliputi bantuan kuota data internet.

Namun Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan nilai 65 atas kebijakan bantuan kuota data internet ini (Tempo.co, 2020) [2]. Nilai ini berdasar pantauan kebijakan dan data survey kinerja Mendikbud RI selama 1 tahun masa jabatan. Dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 75, kebijakan bantuan kuota internet salah satu yang nilainya dibawah KKM. FSGI membeberkan fakta kekurangan dari kebijakan ini, diantara adalah (1) masih banyak keluarga miskin di daerah terpencil yang belum menikmati karena ketidaktersediaan perangkat pembelajaran, seperti ponsel pintar; (2) layanan provider yang dirujuk tidak sepenuhnya mulus terhadap jaringan internet di daerah terisolir; (3) pembagian kuota utama dan belajar tidak tepat, dan terbuang percuma bahkan merugikan keuangan negara.

Disampaikan juga oleh Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda bahwa (CNNIndonesia.com, 2020) subsidi kuota yang diprogramkan Nadiem bagi masyarakat kurang mampu minim verifikasi data, sehingga ada

kemungkinan tidak tepat sasaran dan boros anggaran [3]. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyayangkan jumlah kuota utama hanya sebatas 5 gigabyte, sedangkan fakta di lapangan, pembelajaran lebih banyak menggunakan platform yang tidak terdaftar dalam paket kuota belajar.

Di sisi yang sama Anggota Komisi X DPR, Zainuddin Maliki menyampaikan (Kontan.co.id, 2020) banyaknya keluhan bantuan kuota internet yang tidak dapat digunakan secara penuh dikarenakan pembagian komposisi kuota utama dan belajar tidak proporsional [4]. Selain itu juga rujukan platform kuota belajar yang kurang familiar.

Berdasarkan kritik-kritik yang dilontarkan, Plt Kapusdatin Kemendikbud, Muhammad Hasan Chabibie menuturkan bahwa (Kompas.com, 2020) kemendikbud kemudian menambah daftar aplikasi dan situs yang dapat diakses menggunakan kuota belajar online [5]. Rinciannya yaitu 61 aplikasi pembelajaran, 5 aplikasi konferensi video, dan 2.624 laman kampus dan sekolah.

Namun Hasan menimpali (CNNIndonesia.com, 2020) dengan tidak akan menambah kuota utama, karena esensinya sebagai pendukung kuota belajar [6]. Menurutnya jika kuota utama ditambah, maka peserta didik cenderung tidak belajar, berpotensi main game online, tiktok, atau pun streaming film. Penuturannya berdasar hasil survei sumber sarana belajar yang digunakan peserta didik selama PJJ. Bahkan Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Jumeri mengatakan (Mediaindonesia.com, 2020), kuota umum tidak dapat diperbesar karena kemampuan operator yang terbatas [7].

Prokontra kebijakan memang hal biasa terjadi di masyarakat dan seharusnya tidak perlu menimbulkan permasalahan serius. Sebagai pemerhati pendidikan, alangkah baiknya dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh Kemendikbud RI seyogyanya dapat disikapi dan diterapkan dengan bijak.

Sejatinya apresiasi patut ditujukan karena Instansi ini tetap berupaya sebaik mungkin memberikan fasilitas pendidikan di masa paceklik pandemi. Adanya kritik dan saran dari berbagai pihak juga dengan cepat segera ditanggapi dan dicarikan solusi terbaik.

Sebaliknya sebagai masyarakat penerima bantuan kuota data internet harus sadar bahwa esensi kuota utama hanya sebagai pendukung kuota belajar. Di sini dibutuhkan kreativitas personal dalam penggunaan aplikasi/platform yang tersedia. Misalnya bahan pembelajaran dari youtube dapat ditonton menggunakan kuota chat dengan menyalin link videonya ke aplikasi Whatsapp yang besaran kuotanya mencapai 10 gigabyte. Dengan begitu tidak akan memangkas kuota utama yang diterima.

Dari provider juga memberikan pelayanan berupa promo-promo menarik seputar paket kuota utama yang ramah di kantong. Bahkan terkadang memberikan gratis kuota utama setiap pembelian paket tertentu. Pelayanan-pelayanan inilah yang seharusnya diperhatikan dan dicermati dalam era digital yang serba mudah dan cepat. Dengan begitu ikut berperan sebagai pelaku teknologi yang berkualitas. Maka, sikap bijak dan kreatif sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti ini.

Webtografi

[1] <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pembelajaran-secara-daring-dan-bekerja-dari-rumah-untuk-mencegah-penyebaran-covid19>. Diakses tanggal 19 Desember 2020.

- [2] <https://www.kompas.com/edu/read/2020/08/08/064038571/ini-alasan-mendikbud-buka-pembelajaran-tatap-muka-di-zona-kuning?page=all>. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- [3] <https://nasional.tempo.co/read/1399284/fsgi-nilai-program-bantuan-kuota-kemendikbud-banyak-kekurangannya/full&view=ok>. Diakses tanggal 22 Desember 2020.
- [4] <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-sampaikan-keluhan-terkait-bantuan-kuota-internet-dari-kemendikbud>. Diakses tanggal 22 Desember 2020.
- [5] <https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/23/154928771/kemendikbud-salurkan-kuota-internet-gratis-ke-357-juta-pengguna>. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- [6] <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200928191518-20-551970/kemendikbud-kalau-kuota-umum-ditambah-siswa-tak-belajar>. Diakses tanggal 23 Desember 2020.
- [7] <https://mediaindonesia.com/humaniora/348478/kemendikbud-jika-kuota-umum-diperbesar-operator-nggak-kuat>. Diakses tanggal 23 Desember 2020.